



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 04 Mei 2020

Halaman: 2

Dana Kelurahan Diarahkan untuk Padat Karya

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta mengarahkan dana kelurahan digunakan untuk program padat karya. Pertimbangannya program padat karya bisa memberdayakan masyarakat sekitar yang terdampak kena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan akibat wabah Covid-19. "Dana kelurahan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat berupa program padat karya. Baik pekerjaan fisik maupun non fisik sebisa mungkin dengan padat karya," kata Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Minggu (3/5).

Heroe menyampaikan, program padat karya dengan dana kelurahan itu harus melibatkan warga sekitar. Terutama yang terdampak kena PHK maupun dirumahkan, sehingga bisa diberdayakan dan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. "Program padat karya bisa diikuti warga kelurahan setempat yang kena PHK atau dirumahkan," ujarnya.

Dia menyatakan penanganan kasus Covid-19 sebagian besar sudah ditangani dengan anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Namun masih perlu penanganan dampak sosial ekonomi akibat kondisi wabah Covid-19. Oleh sebab itu, pihaknya sudah mengusulkan ke pemerintah pusat, agar dana kelurahan bisa digunakan untuk jaring pengaman sosial warga terdampak Covid-19. "Di kabupaten, dana desa bisa untuk penanganan Covid-19. Waktu itu belum ada aturan dari pemerintah pusat sebagai dasar penggunaan dana kelurahan untuk penanganan Covid-19. Kami masih menunggu aturan dari Kementerian Dalam Negeri. Sampai sekarang kami belum dapat laporannya," terang Heroe.

Meski demikian pihaknya sudah meminta lurah-lurah untuk mempersiapkan penggunaan dana kelurahan untuk jaring pengaman sosial terdampak Covid-19. Menurutnya dana kelurahan sekitar Rp 350 juta/kelurahan bisa membantu mengampu jaring pengaman sosial warga terdampak Covid-19 yang tidak masuk data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005